

BAB III

PENGARUSUTAMAAN GERAKAN ANTIKORPSI

Madrasah Anti Korupsi adalah salah satu program yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Indonesia tahun 2015-2017, Madrasah Antikorupsi didirikan pada 8 Februari 2015. Tujuan dari Madrasah Anti Korupsi untuk membantu Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai komponen masyarakat madani dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia tahun 2015-2017. Madrasah Anti Korupsi juga memiliki tujuan dakwah amar mahruf nahi mungkar.

Madrasah Anti Korupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dari gerakan anti korupsi lain di Indonesia, yaitu cara memahamkan dan mendidik yang berbeda. Madrasah Anti Antikorupsi mempunyai Tagline dalam gerakannya, yaitu berjamaah lawan korupsi. Tagline ini di gunakan untuk menyerukan kepada para santrinya dalam melakukan gerakan melawan tindak pidana korupsi. Peran Madrasah Antikorupsi sebagai komponen dari masyarakat madani sangat di butuhkan didalam sendi sendi kehidupan sosial di masyarakat.

3.1. Peran Sebagai Masyarakat Madani dalam Pencegahan Korupsi

3.1.1. Muhammadiyah Melawan Korupsi

Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia, sudah selayaknya Muhammadiyah memerangi tindak pidana korupsi. Jauh sebelum

Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah sebenarnya sudah berada pada garis terdepan dalam melawan korupsi. Muhammadiyah pada saat periode 2000-2005 pimpinan Buya Syafi'i Ma'arif telah tegas terhadap masalah tindak pidana korupsi, hal ini di buktikan dengan terbitnya buku korupsi dalam perspektif agama agama pada tahun 2004, membuat kampanye dengan poster poster anti korupsi, dan advokasi antikorupsi. Lalu gerakan tersebut dilanjutkan oleh periode 2005-2015 pimpinan Dien Syamsudin dengan meluncurkan buku fikih antikorupsi perspektif ulama Muhammadiyah pada tahun 2006 , gerakan antikorupsi yang di pelopori oleh Muhammadiyah ini terus ditingkatkan, terbukti ketika kader terbaiknya H.M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010-2014 pada saat Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan tindak pidana korupsi terlihat sangat serius, sikap ini terlihat ketika Muhammadiyah merumuskan 8 (delapan) poin dekonstruksi budaya dalam buku fikih antikorupsi perspektif ulama Muhammadiyah terbitan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, kedelapan poin tersebut yaitu :

1. Memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik yang sudah berlangsung secara turun-temurun, suatu kebiasaan yang telah menambah kesuburan praktik korupsi. Budaya tersebut telah melahirkan sikap *ewuh pekewuh* atau rikuh (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi atau penyimpangan lain
2. Memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang

memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Sebab dalam praktiknya, makna hadiah telah mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri. Hadiah semacam itulah yang semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Misalnya, budaya “amplop” dalam upaya memuluskan sesuatu yang kita inginkan atau menjanjikan komisi pemberi proyek.

3. Memberantas budaya komunalisme dalam kehidupan masyarakat dalam konteks kebergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktik-praktik korupsi karena hal itu dipandang merupakan bagian dari kehidupan komunalnya.
4. Budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi karena segala sesuatu ingin diraih dengan serbasingkat dan tanpa kerja keras. Etos kerjapun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan.
5. Mengikis budaya permisif (bersifat terbuka), hedonistik, dan materialistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong praktik korupsi semakin subur. Begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonistik dan materialistik telah menghilangkan idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya parameter yang digunakan

bersandar pada kenikmatan duniawi dan materi sehingga pelakunya terdorong melakukan penyimpangan atau koruptif agar keinginannya terpenuhi.

6. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi. Orang akan berfikir panjang untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan bersikap kritis dan sekaligus menuntut akuntabilitas terhadap setiap jabatan/kewenangan yang diembannya.
7. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi.
8. Masyarakat harus diberi penjelasan terus-menerus bahwa sebagian dari sikap, kebiasaan, dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolusif dan koruptif.

Dari ke-delapan point diatas dapat disimpulkan, bahwa Muhammadiyah benar benar serius dalam melawan tindak pidana korupsi. Keseriusan ini pun juga tertuang dalam 13 rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, dalam rekomendasi yang ke 9 (sembilan) terdapat point, gerakan berjamaah melawan korupsi. Muhammadiyah memandang korupsi sebuah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi koruptor, memulai

hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri dan rumah masing masing. Membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaah melawan korupsi. Adapun definisi Korupsi menurut Muhammadiyah yaitu penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.

3.1.2. Madrasah Antikorupsi dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Landasan dasar peran atau ide awal Madrasah Anti Korupsi dalam melakukan pencegahan korupsi berawal dari keresahan saat melihat proses pemberantasan korupsi di Indonesia sampai saat ini belum maksimal. Makna korupsi sendiri menurut Madrasah Antikorupsi dalam konvensi antikorupsi tahun 2016 adalah pekerjaan yang tidak beradab dan koruptor di ganti menggunakan kata maling. Maling adalah julukan yang hina dan menhinakan.

Penindakan tegas yang dilakukan KPK dan penegak hukum tidak membuat jera para koruptor di negeri ini, maka diperlukan adanya gerakan pemuda untuk memotong generasi kebawah supaya proses pemberantasan korupsi ini bisa berjalan secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh Virgo Sulistianto dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“...Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2014 - 2018 memulai dengan visi misi gerakan adalah Nalar Baru Gerakan Pemuda Muhammadiyah. Visi misi tersebut diterjemahkan salah satunya melalui gerakan berjamaah lawan korupsi yang dideklarasikan pada 8 Februari

2015. Realitas bahwa praktik korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara bersama sama dan sistematis. Maka untuk melawannya pun dengan semangat berjamaah. Kemudian bicara gerakan antikorupsi juga harus dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan nilai nilai antikorupsi. Untuk menghadirkan anak muda yang memiliki integritas dan semangat perlawanan terhadap korupsi maka didirikanlah Madrasah Antikorupsi, sebagai bentuk aksi nyata dari berjamaah lawan korupsi....” (Wawancara, 18 Februari 2018).

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwa peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kecerdasan kepada masyarakat di Di Indonesia khususnya internal Pemuda Muhammadiyah supaya lebih peka terhadap permasalahan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi secara konsisten menyebarkan sikap antikorupsi dengan harapan permasalahan korupsi dapat dicarikan solusi terbaik. Ketika setiap elemen masyarakat mau ikut berperan secara aktif dalam pemberantasan korupsi, maka korupsi di Indonesia diharapkan bisa menurun kuantitasnya.

Peran Madrasah Antikorupsi dibutuhkan di dalam sendi sendi kehidupan sosial di masyarakat, peran Madrasah Antikorupsi dalam masyarakat madani yang memposisikan diri sebagai organisasi non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dibidang pendidikan antikorupsi di Indonesia yang akan

menghasilkan santri santrinya dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia, “menurut Syamsuddin (1998:12) secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama”.

Masyarakat madani di artikan oleh Zamroni (2008:17) adalah partisipasi sukarela oleh warga negara rata-rata dan karenanya tidak termasuk perilaku yang dipaksakan atau bahkan dipaksakan oleh negara. Peran Madrasah Antikorupsi dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia dibuktikan dengan kerjasama program dengan lembaga-lembaga civil society di Indonesia yang fokus pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan lain-lain. Seperti yang disampaikan oleh Virgo Sulistianto dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“...Sebagai bagian masyarakat sipil MAK terlibat aktif dalam advokasi isu isu korupsi, sebagai upaya kontrol social dalam pencegahan korupsi...”
(Wawancara, 18 Februari 2018)

Dari wawancara diatas dapat di analisis bahwa Madrasah Antikorupsi mempunyai peran yang besar dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di

Indonesia tahun 2015-2017. Advokasi dan kontrol sosial adalah peran yang ditunjukkan oleh Madrasah Antikorupsi sebagai Masyarakat madani, peran itu ditunjukkan dengan cara penyampaian, pengawasan, dan pengontrolan dalam pencegahan antikorupsi. Tidak hanya itu saja Madrasah Antikorupsi juga melakukan perannya dalam masyarakat madani sebagai ruang publik, peran itu realisasikan dengan program diskusi berseri dan mengadakan konvensi antikorupsi tahun 2016. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menginginkan Madrasah Antikorupsi menjadi suatu gerakan anti korupsi *amar mahruf nahi mungkar* yang memiliki kepribadian Islami. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menginginkan Madrasah Antikorupsi membentuk semangat anti korupsi menjadi gaya hidup bagi masyarakat luas, dengan semangat anti korupsi menjadi gaya hidup di masyarakat luas maka akan memberikan motivasi sendiri bagi gerakan berjamaah lawan korupsi. Gerakan berjamaah lawan korupsi adalah tagline yang di tonjolkan oleh Madrasah Antikorupsi dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia, hal ini dapat terlihat ketika tagline tersebut selalu tampil menjadi tema besar pergerakan Madrasah Antikorupsi. Madrasah Antikorupsi juga memposisikan diri sebagai Masyarakat Madani yang mempunyai peran sebagai pendidik di dalam sendi sendi kehidupan sosial di masyarakat. Menurut wawancara dengan Direktur Madrasah Antikorupsi Virgo Sulistianto,

“...peran Madrasah Antikorupsi sebagai komponen dari masyarakat madani sangat begitu di butuhkan dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Madrasah Antikorupsi telah mampu membantu

memberikan sumbangsuhnya dalam hal pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan internal Pemuda Muhammadiyah di Indonesia...”
(wawancara, 18 februari 2018).

Dalam analisis wawancara ini dapat dilihat bahwa peran sebagai masyarakat madani yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi sangat baik dan kuat dalam melakukan pendidikan anti korupsi di Indonesia, peran itu ditunjukkan dengan terealisasinya pembentukan kelas kelas antikorupsi di wilayah wilayah Indonesia. Empat peran penting sebagai masyarakat madani yang di lakukan oleh Madrasah Antikorupsi adalah peran advokasi, kontrol sosial, pendidikan, dan ruang publik.

Adapun pengaruh yang di tunjukkan oleh Madrasah Antikorupsi terbagi menjadi 3 hal, yaitu:

1. Sumberdaya manusia

Terkait dengan sumberdaya manusia Madrasah Anti Korupsi memfokuskan diri pada penanam individu santrinya, dengan cara memberikan pengertian pengertian yang mendalam sesuai fiqih antikorupsi prespektif ulama muhammadiyah. Sehingga lulusan tersebut dapat mengamalkan dan menjadi contoh dan sumber bagi gerakan antikorupsi di Indonesia.

2. Budaya

Terkait dengan budaya, Madrasah Antikorupsi lebih fokus terhadap kesadaran dari setiap individu, Madrasah Antikorupsi bercita cita menjadikan budaya antikorupsi sebagai gaya hidup bagi setiap santrinya, dengan demikian maka budaya antikorupsi akan melekat pada diri setiap santrinya kemanapun dia berpijak, karena bagi Madrasah Antikorupsi, korupsi telah menjadi budaya di Indonesia sehingga melawannyapun juga harus membangun budaya yang baik.

3. Regulasi

Terkait regulasi Madrasah Antikorupsi fokus pada pengawalan pengawalan terkait dengan regulasi regulasi yang berkaitan dengan korupsi, seperti: pengawasan terkait RUU KPK, pembahasan RUU pertembakauan, dll

Peran serta masyarakat madani dalam pencegahan korupsi sudah sepantasnya diberikan ruang, karena tanggungjawab pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Akan tetapi menjadi tanggungjawab seluruh elemen negara ini termasuk masyarakat yang harus ikut aktif dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penindakan hukum yang tegas yang dilakukan oleh lembaga hukum kepada koruptor harus dibarengi dengan penanaman sikap antikorupsi dan pengawasan dari bawah dalam hal ini adalah masyarakat secara umum. Supaya ada sinergi yang kuat dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada penelitian ini Madrasah Antikorupsi juga memiliki pedoman dasar yang dijadikan landasan gerakan berjamaah lawan korupsi yaitu menjadi madrasah yang mendidik santrinya agar mempunyai kesadaran dalam

mengamalkan nilai nilai antikorupsi. Berangkat dari situ harapannya adalah Madrasah Antikorupsi bisa ikut dalam mencari solusi mengatasi permasalahan korupsi yang ada di Indonesia khususnya di bidang pendidikan yang menjadi wilayah gerakan Madrasah Antikorupsi.

3.2. Peran Sebagai Gerakan Sosial Dalam Pencegahan Korupsi

Madrasah Antikorupsi dalam melakukan gerakan berjamaah lawan korupsi tidak mendasarkan pada kasus korupsi yang sedang terjadi, akan tetapi gerakan yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Gerakan gerakan yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi bertujuan untuk membantu KPK dalam perlawanannya terhadap korupsi. Menurut Virgo Sulistianto, Direktur Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

”... Edukasi terhadap anak muda dalam memberikan kesadaran tentang nilai nilai integritas merupakan sebuah investasi kami dalam mencegah korupsi. Selain itu dukungan untuk memperkuat KPK sebagai simbol perlawanan korupsi terus dilakukan, karena saat ini ada upaya dari para korupstor untuk menghancurkan KPK...” (Wawancara, 18 Februari 2018)

Berdasarkan pada pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Madrasah Antikorupsi ikut berperan bersama KPK dalam pencegahan korupsi dengan cara mengedukasi anak muda supaya anak anak muda sadar bahwa nilai nilai integritas harus ada dalam diri mereka. Ditambahkan oleh Virgo Sulistianto Direktur

Madrasah Antikorupsi dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“...Korupsi telah merusak sendi sendi kehidupan bangsa ini, upaya perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini....” (Wawancara, 18 Februari 2018).

Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah tekad bulat yang dimiliki oleh Madrasah Antikorupsi dalam melakukan perannya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh Madrasah Anti Korupsi tentu harus didorong dengan baik. Dorongan yang dilakukan oleh berbagai pihak akan membantu Madrasah Antikorupsi dalam mewujudkan cita-cita mulia, yaitu tertanamnya sikap antikorupsi di seluruh elemen masyarakat. Apalagi keberadaan Madrasah Antikorupsi ini berada di dalam bagian dari organisasi Muhammadiyah, sehingga akan selalu menjadi rujukan dalam pencarian nilai. Ketika nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi bisa terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang akan dijadikan rujukan oleh negara lain atau bahkan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan korupsi.

Adapun ciri khas yang dimiliki oleh Madrasah Antikorupsi dibandingkan dengan gerakan antikorupsi lain yaitu Madrasah Antikorupsi adalah gerakan antikorupsi berciri kebudayaan. Sesuai dengan wawancara pada Direktur Madrasah Antikorupsi, Virgo Sulistianto, berikut kutipan wawancaranya:

“...MAK adalah gerakan antikorupsi dengan ciri kebudayaan. Menumbuhkan kesadaran dan kebudayaan mulai dari diri sendiri terhadap nilai antikorupsi. Memulai MAK juga merupakan kesadaran dari diri sendiri. MAK dibangun atas dasar keinginan anak muda Muhammadiyah di daerah, bukan kegiatan struktural top down...” (Wawancara, 30 April 2018).

3.2.1. Tantangan Kolektif

Sebagai gerakan yang terbentuk dilatar belakang oleh kerusakan moral. Madrasah Antikorupsi merasa prihatin dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang rusak akibat dari maraknya tindak pidana korupsi yang berdampak pada turunnya nilai nilai kejujuran di masyarakat. Kondisi tersebut yang mendorong Madrasah Antikorupsi untuk melakukan gerakan penyelamatan dengan mendeklarasikan gerakan berjamaah lawan korupsi dan mendirikan kelas kelas Madrasah Antikorupsi pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 Madrasah Antikorupsi memperluas gerakannya dengan membentuk kelas kelas Madrasah Antikorupsi ditiap tiap Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Madrasah Antikorupsi menyakini bahwa dengan mendirikan kelas kelasnya di wilayah wilayah Indonesia mampu menjadikan Madrasah Antikorupsi sebagai gerakan sosial bagi pengarusutamaan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Dari cerita diatas, menyiratkan bahwa tantangan kolektif sehingga terbentuknya Madrasah Antikorupsi adalah rendahnya kesadaran nilai nilai kejujuran dan antikorupsi pada masyarakat, terutama yang terjadi di wilayah wilayah Indonesia. Madrasah Antikorupsi dalam perjalanannya juga menghadapi

tantangan berupa kerusakan moral yang merupakan dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap maraknya tindak pidana korupsi.

Tidak bisa dipungkiri, terdapat pro kontra terkait dukungan dalam gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Menurut Virgo Sulistianto, Direktur Madrasah anti korupsi dalam wawancaranya, baik yang di Pusat Jakarta maupun di daerah, baik dukungan dari dalam maupun luar, Madrasah AntiKorupsi membagi permasalahan tersebut menjadi dua (2) :

“...pihak pertama apatis, mereka menganggap remeh terhadap gerakan yang kami bangun. Namun hal itu membuat kami terus bergerak bahwa sumber dari perubahan bangsa ini adalah gerakan antikorupsi...” (wawancara, 30 April 2018)

“...pihak kedua adalah ysng mendukung. Banyak pihak yang apresiasi terhadap gerakan yang kami bangun. Aktifitas advokasi yag kami bangun membuahkan banyak dukungan..” (wawancara, 30 April 2018)

Madrasah Antikorupsi merupakan sebuah gerakan kerelawanan, dimana ikatan yang memperkuat gerakan dari Madrasah Antikorupsi adalah kesadaran masing-masing individu yang terlibat. Seperti yang dikatakan Virgo Sulistianto sebagai Direktur Madrasah Antikorupsi dalam wawancaranya,

“...bahwa mereka bergabung dengan Madrasah Antikorupsi hanya berdasarkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai nilai kejujuran dan antikorupsi di masyarakat dari perbuatan tindak pidana korupsi...”
(Wawancara, 8 Maret 2018)

Dari cerita diatas, dapat dianalisis bahwa Madrasah Antikorupsi merupakan suatu gerakan yang kolektivitas aksinya didasari oleh kesadaran individu-individu yang terlibat. Aksi kolektif yang tergabung dalam Madrasah Antikorupsi menyadari akan pentingnya menjaga moral Masyarakat untuk keberlangsungan hidup manusia. Sehingga hal yang menjadi tantangan kolektif bagi Madrasah Antikorupsi adalah kerusakan moral dan Akhlak. Sebagaimana latar belakang terbentuknya Madrasah Antikorupsi pun di sebabkan oleh rusaknya nilai nilai kejujuran di masyarakat yang berdampak pada maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kesadaran masyarakat yang rendah untuk melawan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sebab dari kerusakan moral yang terjadi. Tindak pidana korupsi yang terus menerus meningkat menjadi salah satu yang diperjuangkan oleh Madrasah Antikorupsi untuk dihentikan. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap gerakan antikorupsi, diakibatkan oleh kepentingan individu atau kelompok dengan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan

3.2.2. Tujuan Bersama

Keprihatinan terhadap kerusakan moral masyarakat menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif Madrasah Antikorupsi. Saat terbentuknya Madrasah Antikorupsi pada tahun 2015 yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Koordinator ICW Ade Irawan, dan para aktivis pegiat antikorupsi lainnya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan kebudayaan. Jika korupsi dianggap sebagai budaya, maka cara untuk melawan korupsi adalah dengan membuat budaya baru, yaitu budaya antikorupsi. Hanya perlawanan melalui kebudayaan yang dapat melawan praktik korupsi secara massif. Melalui gerakan pendidikan diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan tindakan para masyarakat dalam menjadikan antikorupsi sebagai gaya hidup. Individu-individu yang terlibat di dalam Madrasah Antikorupsi tidak hanya para akademisi, kader Muhammadiyah dan aktivis antikorupsi. Namun, mereka yang terlibat dalam Madrasah Antikorupsi juga terdapat masyarakat biasa dan beberapa merupakan orang-orang yang memiliki semangat perubahan. Madrasah Antikorupsi menetapkan tujuan sebagai berikut :

A. Umum

Meningkatnya kesadaran dan kapasitas aktivis Pemuda Muhammadiyah dalam agenda antikorupsi dalam rangka meningkatkan peran kebangsaan kader Pemuda Muhammadiyah.

B. Khusus

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Pemuda Muhammadiyah mulai dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Ranting dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat sipil dalam agenda kebangsaan.
2. Meningkatkan jumlah Mubaligh Pemuda Muhammadiyah yang terlatih sebagai kader antikorupsi.
3. Meningkatkan kesadaran moral aktifis Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna Gerakan Dakwah Muhammadiyah di daerah binaan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis kader Pemuda Muhammadiyah dalam agenda pemberantasan korupsi di daerah binaan.

Madrasah Antikorupsi dalam menerapkan gerakan berjamaah Lawan Korupsi didasari dengan semangat individu individu. Sebagaimana diungkapkan oleh Virgo Sulistianto dalam wawancaranya dengan peneliti,

“...bahwa gerakan berjamaah lawan korupsi didasari oleh semangat dari individu yang terlibat dalam Madrasah Antikorupsi...” (Wawancara, 8 Maret 2018)

Dalam sebuah kolektivitas gerakan, tujuan dan nilai-nilai bersama menjadi basis dalam sebuah tindakan-tindakan bersama. Saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa relawan Madrasah Antikorupsi tersirat bahwa apa yang menjadi tujuan Madrasah Antikorupsi juga menjadi tujuan mereka dalam menjalani kehidupan.

“...Seperti yang diungkapkan Dian Koprianing, beliau bergabung dengan Madrasah Antikorupsi tanpa ada paksaan dari siapapun, melihat apa yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi membuat Dian Koprianing tergugah untuk bergabung dengan Madrasah Antikorupsi. Dengan bergabung, setidaknya sudah menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia...” (Wawancara, 8 Maret 2018)

Hal serupa juga dialami oleh Rifqi Rifai, beliau mengatakan, bergabung dengan Madrasah Antikorupsi juga tergugah dari kesadarannya sendiri. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang dikerjakannya bersama Madrasah Antikorupsi dilakukannya secara ikhlas, walaupun beliau tidak mendapatkan penghasilan dari apa yang beliau kerjakan. Beliau mengatakan bahwa semua itu hanyalah untuk kepentingan masyarakat banyak, apabila dalam pengabdianya sudah melahirkan santri santri yang banyak maka santri santri itu akan menjadi investasi bagi pencegahan korupsi di Indonesia.

3.2.3. Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Permasalahan yang menjadi faktor Madrasah bergerak adalah permasalahan yang terkait dengan nilai-nilai kejujuran dan mental anti korupsi bangsa. Kecintaan terhadap gerakan anti korupsi menjadi faktor utama pemersatu dari setiap individu yang terlibat dalam Madrasah Antikorupsi. Ditambah budaya yang dibangun di dalam Madrasah Antikorupsi adalah budaya berjamaah, menurut Virgo Sulistianto dalam wawancaranya,

“...Madrasah Antikorupsi adalah organisasi yang unik karena organisasi ini menitik beratkan pada kesadaran diri sendiri. Namun, budaya berjamaah itulah yang mempererat agar terus berjalan...” (Wawancara, 8 Maret 2018)

Virgo Sulistianto menambahkan dalam wawancaranya,

“...bahwa gerakan berjamaah lawan korupsi bukanlah gerakan pencitraan. Gerakan ini bergerak atas dasar kepedulian terhadap agenda pemberantasan korupsi, terutama pada proses pencegahan dalam bentuk pendidikan...” (Wawancara, 8 Maret 2018)

Seperti yang sudah diceritakan diatas bahwa relawan yang terlibat dalam Madrasah Antikorupsi memutuskan untuk bergabung di dasari oleh kesadaran yang timbul pada masing-masing individu. Kerusakan moral yang diakibatkan oleh rendahnya nilai nilai kejujuran dan antikorupsi merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan masyarakat. Ketika moral mengalami kerusakan akan memberikan dampak pada hilangnya kepercayaan terhadap sesama individu, sehingga antar individu tidak ada saling peduli terhadap hidup individu lain.

Kolektivitas aksi Madrasah Antikorupsi membentuk suatu identitas kolektif berdasarkan atas kepedulian terhadap semangat antikorupsi. Permasalahan nilai nilai kejujuran dan antikorupsi yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia menjadi faktor penggerak Madrasah Antikorupsi untuk melakukan aksi nyata. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi semata-mata untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa Pengurus Madrasah Antikorupsi sebagaimana sudah diceritakan diatas sebelumnya.

Kemudian untuk membangun solidaritas kolektif, Madrasah Antikorupsi membangun budaya berjamaah yang kuat antara para relawan dengan mengadakan rapat koordinasi secara nasional pada setiap tahunnya. Hal itulah yang menurut beberapa pengurus menjadi faktor untuk mempererat dan menjaga agar gerakan yang dilakukan oleh Madrasah tetap berjalan, seperti yang sudah diceritakan oleh Virgo Sulistianto diatas.

3.2.4. Memelihara Politik Perlawanan

Suatu aksi kolektif dapat berubah menjadi gerakan sosial apabila tujuan, tantangan dan solidaritas serta identitas kolektif mereka dapat dipertahankan. Untuk mempertahankan tiga unsur penggerak tersebut dari Madrasah Antikorupsi tidak memiliki strategi khusus, seluruhnya dikembalikan kepada semangat masing-masing individu.

Sesuatu yang dapat mempertahankan semangat gerakan berjamaah lawan korupsi adalah dari budaya yang dibangun didalam Madrasah Antikorupsi. Dimulai dari bentuk gerakan yang bersifat kerelawanan sampai dengan semangat berjamaah atau kebersamaan yang tinggi dari masing-masing individunya. Untuk membangun rasa kebersamaan tersebut beberapa hal dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi yaitu mengadakan rapat koordinasi nasional pada tiap tahunnya. Semangat *Ibda Binnafsi* yang terbangun dalam iklim gerakan berjamaah lawan korupsi pun menjadi salah satu faktor individu-individu di dalamnya untuk tetap terlibat dalam gerakan berjamaah lawan korupsi. Selain itu, semangat yang dibangun oleh Madrasah Antikorupsi juga terdapat dalam konsep yang diterapkannya, yaitu “jihad lawan korupsi”. Semangat itulah yang tetap mempertahankan para relawan Madrasah Antikorupsi untuk tetap terlibat bersama sama.

3.3. Strategi Dalam Pencegahan Korupsi

3.3.1. Pendirian Kelas Madrasah Anti Korupsi

Dalam perannya sebagai masyarakat madani dan juga perannya sebagai gerakan sosial maka Madrasah Antikorupsi melakukan tugas pendidikannya dengan mendirikan kelas kelas antikorupsi yang secara berkelanjutan. Seperti yang di katakan Virgo Sulistianto dalam wawancaranya,

“...Mendirikan kelas madrasah antikorupsi dan beberapa bekerjasama dengan PTM sekaligus menjadi pusat studi antikorupsi di PTM merupakan upaya Madrasah Antikorupsi melakukan pendidikan anti korupsi...”

(Wawancara, 8 Maret 2018)

kelas tersebut telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia, adapun kelas tersebut sebagai berikut:

A. Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Kelas Perdana Madrasah Antikorupsi didirikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Sebanyak 30 peserta Madrasah Antikorupsi dari berbagai latar belakang pendidikan mengikuti kelas perdana Madrasah Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Tangerang, pada 31 mei 2015. Kelas perdana Madrasah Antikorupsi UMT di resmikan oleh Rektor UMT Bapak Dr. H. Achmad Badawi, S.Pd, SE, MM. Ketum Pimpinan Pusat

Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dan Koordinator ICW (Indonesian Corruption Watch), Ade Irawan

B. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIE AD) Jakarta

Pendirian kelas Madrasah Antikorupsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta diadakan di STIEAD Jakarta pada hari Selasa, 2 Juni 2015 bersamaan dengan Diskusi Berseri Madrasah Antikorupsi. Tema yang diangkat adalah Korupsi dan Pilkada Langsung, sebagai narasumber: Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Ade Irawan (Deputi Koordinator ICW), Ihsan Modjo dan Arsid.

C. Universitas Muhammadiyah Gresik (UM Gresik)

Sebelum memulai kelas Madrasah Antikorupsi di UM Gresik, terlebih dahulu diadakan Deklarasi Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di Lapangan Bunderan Perumahan Gresik Kota Baru pada tanggal 27 Mei 2015. Kemudian diadakan kelas perdana Madrasah Antikorupsi yang diadakan di Auditorium UM Gresik pada tanggal 8 November 2015 dihadiri oleh 30 santri Madrasah Antikorupsi UM Gresik dan civitas akademika UM Gresik, hadir memberikan materi adalah Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Ade Irawan (Wakil Koordinator ICW) dan Tri Aripriabowo (Rektor UM Gresik).

D. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bangka Belitung

Kelas MAK STKIP Bangka Belitung didirikan pertama kali pada tanggal 5 September 2015. Turut hadir 60 santri Madrasah Antikorupsi STKIP Bangka Belitung yang terdiri dari aktifis pemuda dan akademisi di Bangka Belitung. Kelas Perdananya dihadiri oleh Abdul Rahman (Direktur MAK) dan Aradila (Aktivis ICW).

E. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

Launching Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi dan Pendirian Madrasah Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diadakan pada tanggal 15 November 2015 di Auditorium UMS. Hadir 30 santri Madrasah Antikorupsi beserta perwakilan Pemuda Muhammadiyah se Jawa Tengah. Turut hadir memberikan materi adalah Bambang Widjajanto (Pimpinan KPK RI) dan Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah).

F. Universitas Muhammadiyah Magelang (UM Magelang)

Pendirian Madrasah Antikorupsi di UM Magelang diadakan pada saat Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2015. Turut hadir memberikan materi adalah Tjatur Sapto Edy, Anggota DPR RI Komisi III yang membidangi masalah hukum.

G. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU)

Deklarasi Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di Sumatera Utara diadakan pertama kali pada tanggal 21 September 2015 dalam bentuk seminar antikorupsi, turut hadir sebagai pembicara adalah Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Farid Wajdi (Komisioner Komisi Yudisial RI) dan Ray Rangkuty (Pengamat, Direktur Lingkar Madani Indonesia). Kemudian diadakan kelas perdana Madrasah Antikorupsi UMSU pada tanggal 30 Januari 2016. Hadir 30 santri Madrasah Antikorupsi UMSU, pembicara yang hadir adalah Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Tama S Langkun (Peneliti ICW).

H. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS)

Inisiatif berikutnya datang dari Rektor UMTS untuk mendirikan Madrasah Antikorupsi UMTS. Acara MAK UMTS pertama sekali diadakan pada tanggal 28 Januari 2016. Turut hadir memberikan materi adalah Bambang Wijajanto (Pimpinan KPK RI Periode 2011-2015) dan Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah).

I. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kota Sibolga

Kegiatan pendirian Madrasah Antikorupsi direspon oleh banyak Perguruan Tinggi Muhammadiyah, salahsatunya yang berada di Kota Sibolga. Kegiatan perdana diadakan pada tanggal 29 Januari 2016, sebagai pembicara turut hadir yaitu Bambang Wijajanto (Pimpinan KPK RI Periode 2011-2015) dan Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah).

J. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pariaman

Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pariaman meskipun tidak memiliki amal usaha Perguruan Tinggi tetap antusias mendirikan kelas Madrasah Antikorupsi Kota Pariaman. Amal usaha yang dipakai adalah kelas SMA Muhammadiyah Kota Pariaman. Saat pendirian Madrasah Antikorupsi yang diadakan pada tanggal 19 Februari 2016 turut hadir sebagai pembicara adalah Genius Umar (Wakil Walikota Pariaman), Hajriyanto Y Thohari (Ketua PP Muhammadiyah), Andik Setiawan (Wakil Direktur MAK) dan Deputi Pencegahan KPK RI.

3.3.2. Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi

Dalam perannya sebagai masyarakat madani dan juga perannya sebagai gerakan sosial maka Madrasah Antikorupsi melakukan tugas sebagai ruang publik dengan mengadakan diskusi diskusi anti korupsi yang secara berkelanjutan.

A. Diskusi Berseri MAK #1

Diadakan di Aula KH. Ahmad Dahlan Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2015 dengan tema: “Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran”, sebagai narasumber yakni : Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Ade Irawan (Deputi Koordinator ICW), Basuki Tjahayapurnama (Gubernur DKI Jakarta) dan Iman Ariyadi (Walikota Cilegon, Banten).

B. Diskusi Berseri MAK #2

Diadakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta pada hari Selasa, 2 Juni 2015 dengan tema: “Korupsi dan Pilkada Langsung”, sebagai narasumber: Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Ade Irawan (Deputi Koordinator ICW), Ihsan Modjo dan Arsid.

C. Diskusi Berseri MAK #3

Muhammadiyah), Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW), Yenny Wahid (Wahid Institute) dan Johan Budi SP (Pimpinan KPK RI). Diadakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Jakarta pada hari Selasa, 2 Juni 2015 dengan tema: “Korupsi dan Pilkada Langsung”, sebagai narasumber: Dahnil Anzar.

D. Diskusi Berseri MAK #4

Diskusi seri empat diadakan di Aula KH. Ahmad Dahlan Pusat Muhammadiyah Pusat yang dengan hari Pemuda 28 Oktober 2015. Tema yang diangkat adalah Yang Muda yang antikorupsi. Turut hadir sebagai pembicara adalah Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Ade Irawan (Wakil Koordinator ICW), Ray Rangkuti (Lingkar Madani Indonesia) dan Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor).

E. Diskusi Berseri MAK #5

Terkait isu pelemahan KPK RI, selanjutnya Diskusi MAK seri lima diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi KPK yang saat itu sedang

ramai-ramai dilemahkan oleh pihak- pihak tertentu. Agenda Diskusi seri Lima diadakan pada tanggal 24 Desember 2015 di Aula KH. Ahmad Dahlan Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat. Turut hadir sebagai pembicara adalah Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Busyro Muqoddas (Pimpinan KPK RI, periode 2011-2015), Bambang Widjajanto (Pimpinan KPK RI, periode 2011-2015) dan Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW).

F. Diskusi Berseri MAK #6 : Refleksi 1 tahun Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi dan Pertemuan Tokoh Lintas Agama Melawan Korupsi

Kegiatan ini didedikasikan sebagai refleksi 1 tahun Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi yang digagas oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kegiatan ini merespon upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang didorong dari komisi III DPR RI dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tema yang diangkat adalah Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi yang diadakan di Aula KH. Ahmad Dahlan Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2016. Semua tokoh lintas agama yang hadir menyatakan menolak pelemahan KPK RI lewat revisi UU KPK RI yang didorong oleh DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI. Turut hadir sebagai narasumber adalah Agus Raharjo (Ketua KPK RI), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Hajriyanto Y Thohari (Ketua PP Muhammadiyah), Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW), KH Imam Aziz (Ketua PBNU), Wasekjen MUI Pusat Nadjamuddin

Ramly, Perwakilan dari Agama Sikh HS. Dillon, Sekretaris Eksekutif KWI Romo YR Edy Purwanto Pr, Uung Sendana Linggaraja perwakilan MATAKIN atau Konghucu, Nyoman Udayana Sangging perwakilan dari Hindu dan tokoh antikorupsi Romo Benny Susetyo.

G. Diskusi Berseri MAK #7 : “Mahar Politik dan Deparpolisasi”

Dalam merespon isu kekinian dalam konteks pemilukada yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Maka dalam tahapan awal ini, dalam Diskusi Berseri MAK Seri 7 memberikan pandangan dan gagasan terkait Mahar Politik dan Deparpolisasi.

Tema diskusi menjadi penting karena dalam konteks pemilu itulah awal terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di daerah. Kegiatan diskusi ini diadakan di Aula KH. Ahmad Dahlan Pusat Dakwah Muhammadiyah Jarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2016. Dengan Pembicara: M Busyro Muqoddas, Dahnil Anzar Simanjuntak, Donal Faris, Ridwan Affan, dan Bang Siagian.

H. Diskusi Berseri MAK #8: “Terorisme dan Korupsi”

Ketika Organisasi Muhammadiyah dan Ortom Pemuda Muhammadiyah melakukan advokasi secara serius terhadap kematian dari Saudara Siyono yang diduga dilakukan oleh aparat itu sendiri: Densus 88. Dalam perjalanannya tim advokasi menemukan fakta fakta dan intrik politik yang terjadi di sana. Terutama ketika aparat memberikan dua ikat uang yang dibungkus oleh koran.

Setelah tim advokasi menelusuri secara mendalam, ternyata sumber uang itu bukan dari kas negara. Tapi dari pihak swasta atau pengembang. Maka tibalah tim advokasi pada satu hipotesis bahwa isu korupsi itu sengaja di jaga dan dimunculkan guna mendapatkan dana dana segar dari swasta atau pengembang. Maka tema diskusi pada seri delapan adalah Terorisme dan Korupsi. Turut menjadi pembicara: Dahnil Anzar Simanjuntak, Manager Nasution, Todung Mulya Lubis, Haris Azhar, Muhammad Syafii. Kegiatan ini di laksanakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah pada tanggal 29 april 2016.

I. Diskusi Berseri MAK #9: “Ada Rente Pada RUU Pertembakauan”

Korupsi hari ini tidak hanya bermakna mencuri atau maling uang negara (APBN atau APBD) tetapi juga semenjak dalam penyusunan sebuah payung hukum terjadi transaksional. MAK menyebutnya dengan istilah: Korupsi Kebijakan. Maka pada diskusi MAK pada seri ke sembilan mengambil tema: Ada Rente pada RUU Pertembakauan, yang dilaksanakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah pada tanggal 25 Agustus 2016. Dengan Pembicara; Dahnil Anzar Simanjuntak, Sudibyo Markus, dan Julius Ibrani.

J. Diskusi Berseri MAK #10: “Korupsi dan Dinasti Politik”

Politik Dinasti menjadi tema yang selalu menjadi isu yang cukup seksi pada saat saat menjelang atau pelaksanaan pemilu di tiap tiap daerah di Indonesia. Termasuk pada tema diskusi MAK ke sepuluh yaitu Korupsi dan Dinasti Politik yang dilaksanakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah

pada tanggal 19 September 2016. Dengan Pembicara; Dahnil Anzar Simanjuntak, Siti Zuhro, Adnan Topan, Husodo, Djayadi Hanan, dan Embay Mulya Syarif.

K. Diskusi Berseri MAK #11: “Meretas Modus Plt. Kepala Daerah untuk Rente Jabatan ASN”

Madrasah Anti Korupsi (MAK) menilai terjadinya korupsi di tiap tiap daerah di Indonesia itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada sebab musababnya, terutama pada saat rekrutmen Aparat Sipil Negara (ASN). Maka dari itu , MAK melanjutkan asumsi tersebut dengan melakukan penelitian di beberapa daerah dengan menggunakan metode penelitian tujuan.

Hasil penelitian MAK mengejutkan, terhitung 44 Triliyun dana yang berputar dilingkaran rente jabatan ASN tersebut. Maka dari itu, MAK mengadakan diskusi terkait hasil penelitian kami tersebut yang di tanggapi beberapa ahli, di antaranya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dan juga Pengamat Kebijakan Publik Dahnil Anzar Simanjuntak, Bapak Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan), Bapak Arteria Dahlan, Bapak Sofyan, dan Bapak Ade Irawan yang dilaksanakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah pada tanggal 23 Januari 2017. Satu bulan pasca acara tersebut, MAK diundang oleh Bapak Joko Widodo untuk menjelaskan secara langsung kepada beliau di Istana Negara, Jakarta. Tepatnya pada hari Senin, 20 Februari 2017.

L. Diskusi Berseri MAK #12: “Ada Rente di Holding BUMN?”

Holding BUMN menjadi salah satu isu yang menarik untuk dicermati dalam konteks kebangsaan pada saat ini. Karena wacana ini menyangkut banyak pihak yang terlibat didalamnya. Baik dari pihak eksekutif , legislatif, dan juga para pengusaha. Diskusi MAK seri dua belas dilaksanakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah pada tanggal 13 Februari 2017. Dengan Pembicara; Dahnil Anzar Simanjuntak, Faisal Basri, Aryo Djohadikuumo, Faisal (Ketua PPPM).

M. Konvensi Antikorupsi 2016

Konvensi Antikorupsi yang digelar Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diikuti secara aktif oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Antikorupsi, Organisasi Kepemudaan, Ormas, LBH, Akademi, Tokoh Agama, dan Aktivist Partai Politik sejumlah 100 orang, mulai 17 Juni sampai dengan 19 Juni 2016, dengan tema Konvensi “BERJAMAAH LAWAN KORUPSI”.

Acara Konvensi Antikorupsi yang dimulai melalui pembukaan yang teaterikal, pada 17 Juni 2016, dengan mendengar pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, Ketua KPK RI Agus Rahardjo, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, dan Tausiyah Kebangsaan oleh KH. Dr. Haedar Nashir.

Pada hari kedua konvensi mendengarkan masukan melalui Tadarrusan pertama tentang “Masa Depan Gerakan Antikorupsi di Indonesia”, dari berbagai tokoh, antara lain; Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Y. Tohari, Tokoh Agama Sikh HS Dillon, Tokoh Agama Katolik Romo Frans Magins Suseno, Wakil Ketua KPK RI La Ode Muhammad Syarif. Tadarrus kedua tentang “Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi” yang disampaikan oleh, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Advokat Senior Todung Mulya Lubis, Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, Wakil Sekretaris Jendral MUI Amirsyah Tambunan, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo. Tadarrus ketiga tentang “Belajar Anti Korupsi Dari Kepala Daerah” yang disampaikan oleh, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Banda Aceh Lilliza Sa’aduddin Djamal, Bupati Enrekang Muslimin Bando.

Tadarrus keempat tentang “Belajar Antikorupsi Dari Negara Sahabat”, yang disampaikan oleh Perakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat, David Hooman. Tadarrus kelima tentang “Partai Anti Korupsi”, yang disampaikan oleh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuzy, Sekretaris Jendral DPP PD-I Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PAN Ali Taher Parasong, Ketua PKS MARDANI Ali Sera, Ketua Umum PSI Grace Natali dan Ketua PP Muhammadiyah yang juga Mantan Ketua KPK RI Muhammad Busyro Muqoddas. Tadarrus keenam tentang “Perlawanan Terhadap Korupsi dalam Perspektif Media”, yang disampaikan oleh

Pimpinan Redaksi Republika Irfan Junaidi, Pimpinan Redaksi Kompas Budiman Tanurejo, Pimpinan Umum Tempo Bambang Harimurty.

Tanpa Harus Menuding dan menyalahkan pihak lain, dan fokus kepada agenda berjamaah dalam rangka menjemput peradaban berkemajuan yang anti korupsi. Maka Konvensi Antikorupsi 2016 menarik kesimpulan, rekomendasi yang disebut sebagai, “PANCA GERAKAN ANTIKORUPSI”, yang isinya antara lain:

1. Antikorupsi Sebagai Gerakan Kebudayaan
2. Anti korupsi Sebagai Gerakan Rakyat
3. Menebar Kebencian Terhadap Koruptor
4. Koruptor Adalah Maling
5. Membentuk Partai Antikorupsi.

3.3.3. Advokasi Anti Korupsi

Dalam perannya sebagai masyarakat madani dan juga perannya sebagai gerakan sosial maka Madrasah Antikorupsi melakukan tugas advokasi dengan melakukan kampanye kebijakan yang berkaitan dengan antikorupsi yang secara berkelanjutan.

A. MAK On TV

MAK On TV atau Madrasah Antikorupsi On TV adalah program Madrasah Antikorupsi untuk mensosialisasikan nilai-nilai antiKorupsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan ICW dan TV Muhammadiyah. MAK on TV diadakan sebanyak 20 episode yang dijadwalkan tayang setiap hari Kamis

pukul 19.00 – 20.00 WIB. Berbagai narasumber telah diundang diacara ini seperti Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Imam Addaruqudni (Sekjend Dewan Masjid Indonesia), Perwakilan Kedubes Australia, HS Dillon, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Belajar Anti Korupsi Dompot Dhuafa dan lainnya. Saat ini MAK on TV masih berlangsung hingga Mei 2016.

B. Lomba Orasi Anti Korupsi

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah turut berbahagia karena cuma satu-satunya organisasi kepemudaan yang diundang KPK RI untuk ikut memeriahkan Hari Antikorupsi Indonesia (HAKI) 2015 yang dipusatkan di Kota Bandung pada tanggal 10-11 Desember 2015. Kegiatan yang diinisiasi Madrasah Antikorupsi adalah lomba orasi anti korupsi untuk kalangan Pelajar dan Mahasiswa. Respon pelajar dan mahasiswa sekota Bandung ternyata luar biasa, peserta yang mengikuti berasal dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta.

C. Lomba menulis Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi

Kegiatan yang bertepatan dengan refleksi 1 tahun Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi Lomba ini bertujuan untuk mensosialisasikan nilai – nilai antikorupsi di kalangan pemuda. Kegiatan lomba penulisan dibatasi hingga 3 Januari 2016, meskipun sosialisasi hanya via media sosial ternyata respon peserta luar biasa, sampai deadline pengumpulan naskah peserta yang mengirimkan tulisan berjumlah 353 orang. Pemenang yang diambil ada 2 kategori, ide terbaik dan tulisan yang terpopuler (jumlah like terbanyak).

Pemenang lomba 1 mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 1.500.000, pemenang lomba 2 mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 1.000.000,- dan untuk pemenang ke 3 mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 750.000,-. Juara favorit diambil 3 tulisan yang paling populer, masing-masing mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 500.000,- .

D. Kampanye Media

MAK juga melakukan kampanye nilai – nilai anti korupsi lewat kegiatan kreatif dan didistribusikan lewat jejaring media sosial yang dimiliki oleh Madrasah Antikorupsi dan Pemuda Muhammadiyah. Kegiatan kampanye media dalam bentuk meme anti korupsi dan motion graphic antikorupsi.

E. Seminar Nasional Isu Antikorupsi di Daerah Daerah

MAK juga menerima banyak undangan untuk mengisi kegiatan seminar yang bertemakan anti korupsi di sejumlah tempat. Sudah 19 tempat yang mengundang MAK untuk mengisi seminar nasional.

F. Duta Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai dasar dalam membangun budaya anti korupsi. Duta Kejujuran merupakan program membangun nilai kejujuran yang di gagas MAK untuk mendidik nilai nilai anti korupsi di sekolah dan di terapkan dala kehidupan sehari hari.

Duta Kejujuran adalah memilih pelajar jujur di sekolah. Sebelum diadakan agenda kampanye pra-pemilihan selama 3 bulan seperti kampanye

malu mencontek, malu bersepeda motor tanpa helm, kantin kejujuran dan mengadvokasikebijakan sekolah untuk melarang siswa membawa motor.

G. Gerakan Ayah Hebat Untuk Keluarga Antikorupsi

Madrasah Antikorupsi memiliki program Gerakan Ayah Hebat untuk Keluarga Antikorupsi. Program ini dikhususkan untuk mendidik anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak agar punya sikap antikorupsi dalam bentuk permainan, mewarnai gambar dan bernyanyi. Bagi ayah dan ibu disampaikan pengetahuan tentang pentingnya menyelamatkan keluarga dari korupsi mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan satu keluarga. Pendekatannya di perkuat lewat materi tentang keluarga sakinah bagi keluarga Muhammadiyah.

H. Advokasi Isu Anti Korupsi Di Media

Madrasah Antikorupsi turut serta mengawal penguatan isu antikorupsi dimedia. Hal ini menjadi penting karena semakin banyak suara yang ikut terlibat isu antikorupsi semakin massif, termasuk jika ada upaya untuk melemahkan isu antikorupsi dapat segera diantisipasi.

I. Transparansi Laporan Keuangan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Dengan semnagat *Ibda Binnafsi* (bahwa komitmen pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri sendiri). Maka dari itu, PP Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 secara periodik menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan (Tahun 2015 & 2016) kepada para

donatur/donor dan laporan keuangan ini juga dapat diakses secara lengkap oleh publik melalui website PP Pemuda Muhammadiyah: www.pemudamuhammadiyah.or.id.

Hal ini dilakukan sebagai tradisi akuntabilitas dan transparansi yang mulai diterapkan dengan konsisten oleh kepemimpinan periode 2014-2018.

J. Penerbitan Buku Materi Khutbah jumat antikorupsi

Program penyusunan dan penerbitan buku materi khutbah jum'at antikorupsi dirasa perlu karena dapat memperluas jangkauan Madrasah Antikorupsi dalam mengkampanyekan nilai nilai antikorupsi lewat aktifitas keagamaan, seperti khutbah jum'at dan pengajian pengajian. Saat ini materi sudah terkumpul dan siap untuk diedit, dicetak dan didistribusikan. Buku ini akan dicetak sebanyak 10.000 buku.

K. Musik Antikorupsi

Menanamkan nilai nilai antikorupsi tidak harus lewat kegiatan formal seperti pelatihan, diskusi terbatas, seminar dan jurnal. Namun dapat juga disampaikan lewat seni, salah satu seni yang populer ditengah tengah masyarakat adalah musik. Saat ini Madrasah Antikorupsi telah memiliki mini album Madrasah Antikorupsi. selanjutnya akan dilakukan launching dan distribusi lagunya lewat CD. Lagu ini akan dicopy sebanyak 1.000 copy.

L. Konser Antikorupsi

Agar isu anti korupsi semakin massif ditengah tengah masyarakat terutama kalangan muda. Madrasah Antikorupsi pada tahun 2017 memiliki

program unggulan untuk mengadakan konser antikorupsi bersama band band populer. Acara ini dikemas lebih religius populer agar dapat diterima oleh banyak kalangan. Konser ini akan dihadiri oleh 10.000 orang.

M. Jihad Entengan Entengan untuk Antikorupsi

Program lanjutan kampanye antikorupsi lewat sosial media adalah memproduksi meme dan video berdurasi pendek tentang perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mengedukasi masyarakat lewat kampanye seperti ini dirasa perlu agar masyarakat tidak semakin permisif terhadap isu korupsi dan menganggap korupsi adalah musuh bersama.

N. Advokasi Litigasi, Memantau Persidangan Kasus Korupsi

Salah satu Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang didorong untuk santri yang telah melaksanakan perkuliahannya yakni memantau perilaku penegak hukum dalam persidangan kasus antikorupsi. Program ini dirasa perlu karena dapat mendidik publik agar mau terlibat memantau persidangan kasus antikorupsi karena korupsi musuh bersama bangsa dan daya rusaknya dapat mempengaruhi proses pembangunan bangsa.

2.3.4. Kontrol Sosial

Dalam perannya sebagai masyarakat madani dan juga perannya sebagai gerakan sosial maka Madrasah Antikorupsi melakukan tugas sebagai kontrol sosial dengan melaksanakan pengawasan antikorupsi di masyarakat yang secara berkelanjutan

A. Pemantau Pemilu Independen

Aktifitas santri Madrasah Antikorupsi setelah lulus dari kelas yaitu menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL). Salah satu RTLsantri yang terlibat mengadvokasi masyarakat lewat isu antikorupsi adalah melakukan pemantauan pemilu kepada kepala daerah secara independen. Pemantauan yang dilakukan tentang politik uang dan pelanggaran lainnya. Kegiatan ini memiliki multi manfaat karena secara tidak langsung santri Madrasah Antikorupsi turut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan turut serta melakukan sosialisasi jadwal pemilihan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.

3.3.5. Sumber Dana Program

Sumber dana yang di peroleh oleh Madrasah Antikorupsi untuk melaksanakan programnya berasal dari berbagai sumber, sumber itu yaitu:

1. Kas Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah;
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);
4. Indonesia Corruption Watch (ICW);
5. Penjualan Kaos Berjamaah Lawan Korupsi;
6. Dan bantuan lain.

3.4. Demokrasi dan Tantangan Gerakan Antikorupsi

3.4.1. Demokrasi mendorong gerakan sosial antikorupsi

Gerakan sosial mempunyai potensi besar dalam memimpin perbaikan mekanisme akuntabilitas dan memberikan kontribusi signifikan pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan sosial dapat memberikan kontribusi dengan merangsang hubungan kekuasaan yang efektif dan rasional antara negara dan warganya (meningkatkan akuntabilitas vertikal). Mereka dapat meningkatkan tuntutan publik terhadap kinerja negara dan mengorganisir tekanan rakyat untuk membuat negara melayani kepentingan publik. Gerakan sosial dapat juga berkontribusi dengan mempromosikan *checks and balances* yang efektif antara lembaga-lembaga negara (meningkatkan akuntabilitas horizontal). Mereka dapat menginisiasi kerangka kerja kelembagaan, mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga memonitor dan menekan lembaga hukum untuk bertindak melawan pelaku korupsi. Kegiatan ini biasanya bisa memperbaiki kinerja lembaga, dan juga memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dalam kekuasaan (Fox 2000: 1).

Gerakan sosial antikorupsi kedepan harus mampu menganalisis masalah penyebab korupsi dan menawarkan solusi alternatif bagi para pembuat kebijakan. Selain itu, harus diingat bahwa upaya untuk memerangi korupsi memerlukan ketersediaan peraturan perundang-undangan yang kuat, tanpanya upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif -bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, gerakan sosial antikorupsi harus merangsang (dan kadang-kadang memberi

dukungan) politisi dan pembuat kebijakan untuk membuat peraturan dan kebijakan antikorupsi.

Meskipun demikian, penciptaan kerangka hukum dan kelembagaan hanya akan berhasil jika warga mengorganisir diri secara efektif dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pekerjaan badan-badan antikorupsi. Gerakan sosial antikorupsi dapat berfungsi sebagai badan independen yang memantau, meneliti dengan cermat, mendeteksi, dan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mereka mungkin merangsang kerja yang efektif rantai akuntabilitas. Gerakan sosial antikorupsi dapat mendorong akuntabilitas negara dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, menaikkan standar, dan harapan publik kinerja negara, dan melakukan tekanan politik. Peran pengawasan yang telah dimainkan oleh gerakan sosial antikorupsi di beberapa negara terbukti telah mampu mengurangi kemungkinan korupsi.

Meskipun memiliki potensi, usaha gerakan sosial antikorupsi tersebut menghadapi resistensi dari para elite dan pemimpin politik. Oleh karena itu, gerakan sosial antikorupsi perlu menjadi profesional dan berpengetahuan untuk dapat melawan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan itu. Selain itu, gerakan sosial tidak bisa bekerja sendirian dalam memerangi korupsi. Mereka membutuhkan sebuah koalisi untuk mencapai yang lebih luas dan dampak yang lebih luas dan signifikan. Untuk alasan ini, gerakan sosial harus membuat usaha jangka panjang upaya berkelanjutan untuk mendorong semua stakeholder untuk membangun tindakan kolektif. Media, akademisi, sektor bisnis dan kelompok-kelompok agama adalah partner yang dapat terlibat untuk membangun sebuah

fokus antikorupsi. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong para elite dan politisi untuk memiliki kepentingan dalam reformasi karena semua dari mereka akan mendapatkan keuntungan dari popularitas, citra internasional yang baik, legitimasi, dan meningkatkan pembangunan untuk kelangsungan hidup politik mereka.

3.4.2. Tantangan Gerakan Antikorupsi

Korupsi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Korupsi berakar pada politik penyelenggaraan negara yang tidak sehat. Institusi dan aparatur negara dikuasai secara tak langsung oleh elite politik yang didukung birokrat dan kelompok bisnis. Korupsi dalam pengertian lebih luas dijadikan sebagai metode untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas pengaruh mereka dalam pengelolaan negara.

Korupsi juga digunakan melayani akumulasi modal kelompok bisnis tertentu dibandingkan mendorong pemerataan ekonomi, apalagi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Praktik serupa juga dilakukan oleh politisi, birokrat, dan pengusaha di tingkat lebih rendah ataupun di daerah. Oleh karena itu, wajar jika upaya pemberantasan korupsi tidak mendapatkan tempat dalam pengelolaan negara. Sebaliknya, gerakan ini justru dilemahkan, bahkan jika perlu dimatikan agar tidak mengganggu, menghambat, dan mematikan upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Berbicara mengenai tantangan gerakan antikorupsi kedepan, ada dua hal yang perlu di perhatikan, yaitu dari segi pengawasan dan pemberantasan. Pertama,

gerakan antikorupsi kedepan harus mempunyai sistem pengawasan yang tersistematis antar gerakan bahkan tidak diranah itu saja, pengawasan antikorupsi harus merambah ke ranah dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus menjadi embrio bagi gerakan antikorupsi, kurikulum antikorupsi harus diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia, Madrasah Antikorupsi harus masuk pada ranah pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Madrasah Antikorupsi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah harus menjadi pelopor masuknya kurikulum antikorupsi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kampus harus memfasilitasi, mendorong, dan menjadi pusat kajian anti korupsi sehingga, lulusan perguruan tinggi tersebut dapat menjadi contoh dan aktor dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Berikutnya dalam hal pengawasan juga harus di perhatikan oleh gerakan antikorupsi. Pengawasan yang terstruktur oleh gerakan antikorupsi akan menjadikan kelompok-kelompok yang anti terhadap gerakan antikorupsi semakin sempit untuk bergerak melakukan perlawanan. Kedua, gerakan antikorupsi kedepan tidak hanya berhenti kepada ranah pencegahan saja, akan tetapi gerakan anti korupsi harus bisa membantu pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3.5. Prospek Gerakan Antikorupsi berbasis Masyarakat Madani

Madrasah Antikorupsi merupakan gerakan anti korupsi yang berada di Indonesia berbasis Masyarakat Madani. Dari hasil penelitian, peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi dengan melakukan upaya pencegahan korupsi yang ada di Indonesia dengan melakukan 4 (empat) peran, yaitu (1)

pendidikan antikorupsi, (2) ruang diskusi antikorupsi, (3) advokasi antikorupsi (4) pengawasan antikorupsi. Berdasarkan dari hasil temuan-temuan pemaparan diatas, maka dapat di analisis bahwa:

Madrasah Antikorupsi telah berperan dalam upaya pencegahan korupsi melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah Pertama, pendidikan antikorupsi dengan mendirikan kelas antikorupsi di wilayah Indonesia. Kedua, diskusi antikorupsi yang terdiri dari diskusi berseri dan konvensi antikorupsi. Ketiga, advokasi antikorupsi yang terdiri dari MAK on TV, lomba orasi antikorupsi, lomba menulis antikorupsi, kampanye media, duta kejujuran, gerakan ayah hebat untuk keluarga antikorupsi, advokasi isu antikorupsi dimedia, penerbitan buku khutbah jumat antikorupsi, musik antikorupsi, konser antikorupsi, jihad enteng entengan untuk antikorupsi, dan memantau persidangan kasus korupsi. Keempat, pengawasan sosial dengan cara memantau pemilu secara independen.

Peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi dalam upaya pencegahan korupsi di atas memiliki implikasi terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia. Madrasah Antikorupsi terus konsisten terhadap program programnya sehingga Madrasah Antikorupsi dianggap mempunyai pengaruh yang kuat terhadap gerakan anti korupsi di Indonesia. Program program tersebut efektif dan relefan untuk gerakan antikorupsi, karena ketika organisasi antikorupsi lain sedang membangun tiang tiang penyangga agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, Madrasah Antikorupsi mengambil langkah dengan membangun pondasinya, ini terbukti dengan di dirikannya kelas antikorupsi di beberapa

wilayah di Indonesia yang mampu membentuk kader yang menjadikan gerakan antikorupsi sebagai gaya hidupnya. Kader yang di miliki oleh Madrasah Antikorupsi inilah yang nantinya akan terjun bersama gerakan anti korupsi lain untuk menjadi tiang tiang penyangga dalam agenda pemberantasan korupsi di Indoneia

Madrasah Anttikorupsi mempunyai modal yang kuat dalam pengarusutamaan gerakan antikorupsi berbasis masyarakat madani di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperkuat lagi oleh Madrasah Antikorupsi. Pertama, soal keorganisasian, keorganisasian sangat perlu di perkuat agar dalam membentuk pondasi gerakan antikorupsi di Indonesia Madrasah Antikorupsi lebih kokoh, hal ini dapat menjadikan rujukan bagi organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk menjadikan kader Madrasah Antikorupsi sebgai tiang penyangga agenda pemberantasan antikorupsi di dalamnya.

Beberapa pemaparan terkait peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi dan implikasinya terhadap pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia tersebut di atas harus dijadikan sebagai refleksi bersama bahwa korupsi sudah tidak sepiantasnya didiamkan, melainkan harus dilawan. Peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi pada dasarnya merupakan gerakan yang mulia dan harus terus dilakukan, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus terus ditingkatkan supaya menjadi gerakan yang besar. Mengingat korupsi di Indonesia yang sudah luar biasa permasalahannya, Madrasah Antikorupsi ini perlu untuk terus ditingkatkan dalam proses gerakannya untuk lebih menyentuh pada

pengawasan kepada pemerintah dan juga penegakan hukum. Peran yang dilakukan oleh Madrasah Antikorupsi harus kita apresiasi dan dukung atau bahkan dapat dijadikan contoh oleh organisasi yang lain.

Oleh karena itu, Madrasah Antikorupsi merupakan modal bagi gerakan antikorupsi di Indonesia yang harus dikembangkan. Madrasah Antikorupsi sangat prospek untuk gerakan antikorupsi berbasis masyarakat madani di Indonesia dengan begiitu, sudah selayaknya Madrasah Antikorupsi menjadi rujukan bagi gerakan antikorupsi di Indonesia.